* Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mengkaji ulang IPL (Izin Penetapan Lokasi) Pertambangan Batu Andesit yang terindikasi belum sesuai prosedur dalam perundang-undangan yang ada, salah satunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara
* Menuntut pemerintah untuk Mengkaji ulang AMDAL (Analisi Dampak Lingkungan) yang terindikasi dimanipulasi atau belum sesuai kondisi realita yang ada, khususnya data mengenai persetujuan warga
* Mengecam segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas
* Menuntut Pemerintah untuk tidak melanjutkan pengukuran terlebih dahulu sebelum situasi kembali kondusif
* Menuntut agar Polda Jateng dan Polres Purworejo menarik pasukan pengawalan terhadap pengukuran lahan karena menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan terhadap masyarakat
* Memberi himbauan kepada warga khususnya yang ada di desa Wadas agar lebih memahami tujuan PSN (Proyek Strategi Nasional) dalam hal ini pembangunan Bendungan Bener dan Pertambangan Batu Andesit sehingga persetujuan atau penolakan yang dilakukan tidak hanya ikut-ikutan semata
* Meminta kepada Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi lebih terkait PSN khususnya dalam hal ini warga Desa Wadas dan umumnya untuk warga di daerah yang menjadi tempat pembangunan PSN serta memediasi ketika terjadi ketidaksepakatan antar masyarakat sehingga tidak terjadi konflik